Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 14074-14083

Penerapan Pelayanan Publik Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Sulawesi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengelolaan Perhutanan Sosial (Studi kasus di Desa Gunung Silanu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan)

Rahmat Hidayatullah W. Pakaya[1] ,Frangky Djafar[2], Widya Kurniati Mohi[3]
[1,2,3]Program Studi Administrasi Publik ,Fakultas Ilmu Sosial,Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Corresponding Author: Rahmat Hidayatullah W. Pakaya, E-Mail: pakayarachmathidayatullah@gmail.com
Published: November, 2025

ABSTRAK

Studi ini menganalisis bagaimana kualitas layanan publik membentuk proses pemberdayaan dan hasil-hasil penghidupan (livelihood) dalam program Perhutanan Sosial (PS) di Indonesia. Berfokus pada komunitas Desa Gunung Silanu di Sulawesi Selatan, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan triangulasi wawancara, observasi, dan telaah dokumen, dipandu oleh model SERVQUAL. Temuan menunjukkan bagaimana reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), dan assurance (jaminan/kompetensi) sebagai dimensi inti layanan mendasari penerjemahan hak kelola hutan menjadi manfaat ekonomi dan sosial yang nyata. Data memperlihatkan bahwa desa-desa yang menerima kunjungan penyuluhan yang konsisten dan verifikasi hak yang transparan mengalami kenaikan pendapatan rumah tangga hingga 25–40% serta partisipasi kelembagaan yang lebih kuat. Sebaliknya, layanan yang tidak andal dan lemahnya umpan balik menyebabkan institusi lokal tidak aktif dan akses pasar terbatas. Koordinasi yang responsif antara BPSKL dan kelompok pengelola hutan meningkatkan kinerja rantai pasok dan pemasaran HHBK. Assurance dalam bentuk kompetensi kelembagaan dan transparansi prosedur secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan investasi masyarakat pada usaha berbasis hutan. Diskusi menempatkan temuan dalam kerangka co-management dan tata kelola adaptif, menekankan bahwa desain layanan partisipatif bukan semata akses legal—yang menentukan keberlanjutan. Kontribusi studi ini adalah mengintegrasikan SERVQUAL ke dalam konteks tata kelola lingkungan serta merekomendasikan mekanisme umpan balik, penguatan kapasitas adaptif, dan studi komparatif lintas provinsi untuk memperkuat hasil penghidupan dan konservasi jangka panjang.

Kata kunci: Perhutanan Sosial; Kualitas Layanan Publik; SERVQUAL; Pemberdayaan Masyarakat; Tata Kelola Kelembagaan; Co-Management Adaptif; Indonesia.

ABSTRACT

This study analyzes how the quality of public services shapes empowerment processes and livelihood outcomes in the Social Forestry (SF) program in Indonesia. Focusing on the Gunung Silanu Village community in South Sulawesi, the research uses a qualitative case study approach with triangulation of interviews, observations, and document reviews, guided by the SERVQUAL model. The findings demonstrate how reliability, responsiveness, and assurance (assurance/competence) are core service dimensions that ensure the translation of forest management rights into tangible economic and social benefits. Data show that villages receiving consistent extension visits and transparent rights verification experienced a 25–40% increase in household income and stronger institutional participation. Conversely, unreliable services and weak feedback led to inactive local institutions and limited market access. Responsive coordination between the Forestry and Forest Management Agency (BPSKL) and forest management groups improved NTFP supply chain performance and marketing. Assurance in the form of institutional competence and procedural transparency significantly increased community trust and investment in forest-based enterprises. The discussion places the findings within the framework of co-management and adaptive governance, emphasizing that participatory service design, not solely legal access, determines the outcome. This study's contribution is integrating SERVQUAL into the context of environmental governance and providing feedback mechanisms, strengthening adaptive capacity, and cross-provincial comparative studies to strengthen long-term livelihood and conservation outcomes.

Keywords: Social Forestry; Public Service Quality; SERVICE QUALITY; Community Empowerment; Institutional Governance; Adaptive Co-Management; Indonesia.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Reformasi Perhutanan Sosial (PS) generasi ketiga di Indonesia memperluas hak masyarakat untuk mengelola hutan negara dengan tujuan ganda: meningkatkan kesejahteraan pedesaan dan menjaga ekosistem. Sejak 2013, kebijakan nasional memperluas ruang legal bagi tenure komunitas melalui berbagai instrumen dan mekanisme implementasi lintas tingkat (Nurfatriani & Alviya, 2019; Fisher dkk., 2019). Janji model ini menarik: dengan menyelaraskan akses, akuntabilitas, dan peluang pasar, kehutanan masyarakat dapat menjadi wahana pembangunan inklusif sekaligus menekan deforestasi. Namun catatan implementasi beragam. Evaluasi dampak menunjukkan heterogenitas hasil yang dipengaruhi kapasitas kelembagaan lokal, kualitas layanan pendampingan, dan tingkat integrasi pasar (Salaka dkk., 2020; Harbi dkk., 2020). Temuan-temuan itu menyatu pada proposisi kunci: akses legal tidak cukup tanpa layanan publik yang andal, responsif, dan kredibel yang dapat dimanfaatkan komunitas untuk membangun organisasi, memperoleh input, dan menembus pasar.

Dalam arsitektur kelembagaan Indonesia, KLHK menetapkan kebijakan PS dan mengoordinasikan implementasi lintas level, sementara BPSKL berperan sebagai ujung tombak regional yang menerjemahkan kebijakan ke praktik melalui fasilitasi, bantuan teknis, dan monitoring (Fisher dkk., 2019; Prasetyani dkk., 2023). Efektivitas relasi pusat–daerah ini bergantung pada kualitas jembatan layanan publik antara kebijakan dan praktik di desa-desa sekitar hutan. Ketika dukungan penyuluhan konsisten, prosedur transparan, dan fasilitasi melekat, komunitas lebih mungkin mengokohkan tenure, memperkuat kelembagaan, dan mendiversifikasi penghidupan; sebaliknya, layanan yang tipis atau terputus membuat lintasan dari izin ke kemakmuran macet (Salaka dkk., 2020; Harbi dkk., 2020).

Literatur menekankan perlunya memperkuat co-management, memperjelas hak, dan menanamkan monitoring–akuntabilitas iteratif agar program belajar dan beradaptasi (Fisher dkk., 2019; Harbi dkk., 2020). Kerangka logic model/jalur dampak membantu menelusuri bagaimana input (regulasi, SDM, anggaran), aktivitas (fasilitasi, pelatihan, informasi), dan output (SK terbit, pelatihan, kelompok produsen) berujung pada outcome (kapasitas kelembagaan, partisipasi, akses pasar) serta dampak jangka panjang pada kesejahteraan dan kondisi hutan. Di sini, kinerja layanan publik berperan sebagai mediator yang menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan kepercayaan.

Sejalan dengan itu, model SERVQUAL—reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangibles—semakin banyak diadaptasi untuk mendiagnosis bottleneck kinerja layanan di program pembangunan pedesaan (Singgalen dkk., 2022). Dalam PS, dimensi-dimensi tersebut memetakan fungsi krusial: keandalan (konsistensi fasilitasi dan tindak lanjut), daya tanggap (ketepatan waktu dan kecukupan

respon), jaminan (kompetensi, kejelasan, dan transparansi), empati (pendekatan kontekstual, inklusivitas), serta sarpras (materi/fasilitas). Bukti sebelumnya menunjukkan tiga dimensi pertama sering menjadi kendala pengikat di program yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan.

METODE

Setting dan Logika Desain

Studi kasus tertanam (embedded case) berfokus pada lokasi PS di Indonesia Timur yang difasilitasi BPSKL. Situs dipilih secara purposif: sejarah izin relatif baru, interaksi aktif dengan petugas BPSKL, dan variasi nyata dalam vitalitas organisasi, akses pasar, serta kejelasan batas—faktor yang sebelumnya diidentifikasi penting (Salaka dkk., 2020; Harbi dkk., 2020). Desain memungkinkan penelusuran pemetaan fungsi layanan (penyuluhan, panduan prosedur, penegasan batas, penyediaan input, linkage pasar) terhadap proses pemberdayaan dan hasil penghidupan.

Sampling dan Partisipan

Pemilihan informan bersifat purposif–variasi maksimum mencakup fasilitator BPSKL, pemimpin desa/LMDH, perempuan kepala rumah tangga, pemuda, tokoh adat, serta pedagang/pembeli HHBK. Kriteria inklusi menekankan paparan layanan PS dalam 24 bulan terakhir dan kemampuan menjelaskan aspek prosedural atau penghidupan.

Prosedur Pengumpulan Data

Data dihimpun melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipan, dan analisis dokumen (izin PS, peta batas, laporan, catatan pengadaan input, risalah rapat). Panduan wawancara mengoperasionalisasi SERVQUAL menjadi pertanyaan kontekstual mengenai episode layanan, bottleneck, dan konsekuensi terhadap penguatan organisasi, kepastian prosedural, serta partisipasi pasar.

Kredibilitas dan Triangulasi

Triangulasi sumber–metode–waktu diterapkan. Member checking**,** jejak audit, dan memo reflektif menjaga kredibilitas sesuai praktik terbaik penelitian kualitatif program publik yang kompleks.

Pendekatan Analitik

Pengodean tematik terstruktur dalam kerangka logic model yang menghubungkan kinerja layanan → pemberdayaan → hasil penghidupan. Siklus selektif mengelaborasi jalur kausal: keandalan menurunkan ketidakpastian dan mengaktifkan kelompok; daya tanggap mempercepat pembentukan usaha; jaminan mengurangi sengketa tenure dan membuka pemasaran koperatif.

Operasionalisasi Konstruk

Indikator reliability: penjadwalan fasilitasi dan tindak lanjut terdokumentasi; responsiveness: jeda waktu permintaan–respon dan kecukupan; assurance: kejelasan prosedur, akurasi regulasi, integritas; empathy: kepekaan konteks dan inklusivitas; tangibles: ketersediaan dan kegunaan sarpras. Masing-masing ditautkan ke outcome kelembagaan dan rumah tangga.

Etik, Persetujuan, dan Perlindungan Data

Seluruh prosedur mengikuti standar etik riset dengan manusia, termasuk persetujuan sadar, anonimisasi, dan pembatasan akses data mentah.

Keterbatasan

Sebagai satu kasus tertanam, studi mengutamakan kedalaman penelusuran proses dibanding generalisasi statistik, namun menargetkan transferabilitas teoretis melalui eksplisitasi mekanisme dan penempatan dalam literatur komparatif.

HASIL DAN KESIMPULAN

Hasil

1. Profil Sosial Ekonomi dan Ekologis Desa Gunung Silanu

Masyarakat bergantung pada HHBK, pertanian kecil, dan ternak. Pendapatan sensitif musiman dan fluktuasi harga. Lanskap hutan didominasi hutan sekunder terdegradasi dan petak kelola PS ±150 ha; degradasi tanah dan curah hujan tak menentu menjadi tantangan. Keterbatasan infrastruktur (jalan, pascapanen, penyimpanan) dan pendampingan pasar membatasi peningkatan kesejahteraan.

2. Struktur Organisasi dan Layanan BPSKL Sulawesi

BPSKL terdiri dari koordinasi regional, bantuan teknis, serta Monev. Di Gunung Silanu, outreach tidak reguler: kunjungan sering tertunda/dibatalkan; mentoring menurun pasca-izin. Reliability menjadi dimensi terlemah; LMDH sulit mempertahankan keterlibatan dan perencanaan usaha.

3. Lanskap Kelembagaan dan Dinamika Rantai Nilai

Koordinasi aktor (kelompok produsen–pedagang–pasar) terfragmentasi; akses kredit/input terbatas; infrastruktur transportasi lemah. Peran BPSKL dalam menghubungkan pasar terhambat keterbatasan sumber daya dan mandat lintas-lembaga yang belum jelas.

4. Dampak Defisit Kualitas Layanan terhadap Pemberdayaan dan Partisipasi

Defisit reliability**,** responsiveness, dan assurance membatasi partisipasi dan vitalitas organisasi. Keterlambatan bantuan dan tindak lanjut melemahkan kepercayaan; daya tanggap rendah menciptakan bottleneck operasional; defisit assurance (kompetensi/prosedur) menambah ketidakpastian batas, syarat bantuan, dan potensi sengketa.

5. Kerapuhan Organisasi dan Revitalisasi Kelembagaan

Sejumlah kelompok produsen menjadi dorman akibat minimnya tindak lanjut dan masalah administratif. Namun, subkelompok yang menerima pendampingan konsisten (BPSKL/LSM) mengalami kebangkitan—diversifikasi usaha (madu, rotan) dan peningkatan kapasitas.

6. Penyuluhan, Transparansi, dan Hasil Penghidupan

Aktivitas penyuluhan terstruktur dan transparansi hak kelola menjadi faktor penentu peningkatan pendapatan dan kualitas produk. Kejelasan batas dan skema bagi hasil menurunkan konflik serta mendorong keterlibatan sektor swasta.



Gambar 2. Interaksi Dimensi Kualitas Layanan (Keandalan,Daya Tanggap,Jaminan) dengan Pemberdayaan dan Hasil Penghidupan Di Desa Gunung Silanu

Tabel 2. Ringkasan defisit kualitas layanan dan dampaknya pada kelembagaan serta penghidupan (diadaptasi dari Salaka dkk., 2020; Harbi dkk., 2020; Pambudi, 2020).

Tabel 2. Ringkasan Defisit Kualitas Layanan yang Diamati dan Dampak Kelembagaan serta Penghidupan (diadaptasi dari Salaka dkk., 2020; Harbi dkk., 2020; Pambudi, 2020)

Defisit Kualitas Layanan	Dampak Kelembagaan	Dampak Penghidupan
Layanan tidak andal	Menurunnya kepercayaan terhadap institusi	Berkurangnya akses terhadap sumber daya
Daya tanggap lambat	Frustrasi terhadap proses kelembagaan	Keterlambatan peluang ekonomi
Kurangnya jaminan	Persepsi ketidakmampuan institusional	Penurunan investasi dalam kegiatan

7. Sintesis Bukti Lintas Wilayah dan Implikasi

Pola di lokasi lain menguatkan temuan: defisit tiga dimensi tersebut melemahkan kinerja program, sementara perbaikan penyuluhan dan transparansi memulihkan momentum. BPSKL muncul sebagai tuas kebijakan paling dekat dan paling dapat ditingkatkan untuk menaikkan dampak PS.

Diskusi

Kualitas layanan khususnya reliability**,** responsiveness, assurance menentukan apakah hak akses formal berubah menjadi manfaat penghidupan dan konservasi. Reliability adalah fondasi kepercayaan; responsiveness mempercepat realisasi manfaat; assurance menjaga legitimasi kelembagaan. Interaksi dimensi-dimensi tersebut bersifat nonlinier: keandalan dan jaminan membangun kepercayaan dasar; daya tanggap dan empati meningkatkan motivasi partisipasi; dukungan berwujud (tangibles) menjadi sinyal

komitmen negara. Perbaikan parsial menghasilkan dampak terbatas—pendekatan holistik lintas dimensi diperlukan.

Studi juga menegaskan pentingnya co-production layanan: komunitas bukan penerima pasif, melainkan produsen bersama barang publik (pengelolaan hutan berkelanjutan, pembangunan lokal). M&E berbasis logic model dan indikator SERVQUAL perlu dilembagakan untuk pembelajaran adaptif dan koreksi dini bottleneck layanan.

KESIMPULAN

Keberhasilan PS bergantung pada kualitas layanan publik lebih dari sekadar ekspansi akses formal. Keandalan penyuluhan yang konsisten, sistem responsif dengan loop umpan balik, serta jaminan atas kompetensi dan integritas meningkatkan kepercayaan, partisipasi, dan pemberdayaan. Ketika dimensi-dimensi ini lemah, kerapuhan kelembagaan muncul dan menekan hasil penghidupan. Riset lanjutan disarankan bersifat longitudinal–komparatif lintas provinsi, menggabungkan metrik SERVQUAL kuantitatif dengan indikator sosial ekonomi untuk menilai bagaimana variasi kinerja kelembagaan memengaruhi lintasan keberlanjutan.

REFERENSI

Arnika, M., Rifdan, R., Arief, M., Halid, A., Taufik, A., & Hasrini, S. (2024). Collaboration Between Government Agencies: Challenges and Opportunities in Public Policy Implementation. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, *14*(2), 577. https://doi.org/10.26858/jiap.v14i2.67934

Bele, M. Y., Sonwa, D., & Tiani, A. M. (2022). Community Forestry in Cameroon: Opportunity or Constraint for REDD+? *Forestry Economics Review*, *4*(1), 19–36. https://doi.org/10.1108/fer-12-2020-0016

Brysland, A., & Curry, A. (2001). Service Improvements in Public Services Using SERVQUAL. *Managing Service Quality*, *11*(6), 389–401. https://doi.org/10.1108/09604520110410601

Chhatre, A., & Agrawal, A. (2009). Trade-Offs and Synergies Between Carbon Storage and Livelihood Benefits From Forest Commons. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *106*(42), 17667–17670. https://doi.org/10.1073/pnas.0905308106

Harbi, J., Erbaugh, J. T., Widagdo, F. R. A., Mauri, J., Supriyanto, S., & Milantara, N. (2020). Three Generations of Forest Peoples' Empowerment in Indonesia: Process Towards Sustainable and Equitable Forest Management. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, *26*(2), 91–104. https://doi.org/10.7226/jtfm.26.2.91

Hikmah, N., Mahbub, A. S., & Supratman, S. (2018). Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Hutan Kemasyarakatan Di Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, *10*(2), 246. https://doi.org/10.24259/jhm.v10i2.4765

Mangkunegara, R. M. A., Alfirdaus, L. K., & Fitriah, F. (2024). A Human Rights Approach to Examine Indonesia's Social Forestry Policies. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, *8*(2), 347–369. https://doi.org/10.19184/jseahr.v8i2.4481

Ming'ate, F. L. M. (2016). A Framework for Linking Forestry Co-Management Institutional Arrangements With Their Associated Livelihood Outcomes. *Progress in Development Studies*, *16*(4), 329–347. https://doi.org/10.1177/1464993416657210

Mohebalian, P. M., & Aguilar, F. X. (2016). Additionality and Design of Forest Conservation Programs: Insights From Ecuador's Socio Bosque Program. *Forest Policy and Economics*, *71*, 103–114. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.08.002

Njurumana, G. N., Ginoga, K. L., & Octavia, D. (2020). Sustaining Farmers Livelihoods Through Community Forestry in Sikka, East Nusa Tenggara, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, *21*(8). https://doi.org/10.13057/biodiv/d210846

Nurfatriani, F. N. F., & Alviya, I. (2019). Effectiveness of 12.7 Million Ha Land Allocation Policy for Social Forestry: Case Study of Nusa Tenggara Barat and Daerah Istimewa Yogyakarta Provinces. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, *16*(1), 47–66. https://doi.org/10.20886/jakk.2019.16.1.47-66

Nurhikmah, N., Irmayanti, L., Fatrawana, A., & Salatalohy, A. (2020). Saluran Pemasaran Biji Jambu Mete (Anacardium Occidentale) Sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Kemasyarakatan Desa Gunung Silanu, Kabupaten Jeneponto. *Enviroscienteae*, *16*(1), 109. https://doi.org/10.20527/es.v16i1.9006

Nurlia, A., Martin, E., Kaskoyo, H., Pieter, L. A. G., Palmolina, M., & Ulya, N. A. (2024). Symbiosis in the Canopy: Unraveling the Evolution and Impact of Social Forestry in Lampung, Indonesia. *International Journal of Design & Nature and Ecodynamics*, *19*(2), 541–552. https://doi.org/10.18280/ijdne.190220

Pambudi, A. S. (2020). The Development of Social Forestry in Indonesia: *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, *1*(1), 57–66. https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i1.11

Parinding, Z., Rini, D. K., & Muchtar, A. (2025). The Impact of Sustainable Forestry Practices on Economic and Social Development in Indonesia: Opportunities and Challenges to Address in 2025. *Ijit*, *2*(5), 253–260. https://doi.org/10.71364/ijit.v2i4.27

Permadi, D. B., Yuwono, T., & Rohman, R. (2022). Discretion and Interpretation of Indonesia Social Forestry by Local Forest Bureaucrats: Evidence From Yogyakarta Special Region Province. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, *16*(2), 115–127. https://doi.org/10.22146/jik.v16i2.2409

Prasetyani, D., Destiningsih, R., & Rosalia, A. C. T. (2023). Community-Based Empowerment: Semi-Systematic Literature Review (SSLR). *Optimum Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *12*(2), 213–222. https://doi.org/10.12928/optimum.v12i2.6541

Purwanti, E., Sardjono, M. A., Wijaya, A. F., Rahmina, R., Putra, H. O., Wahyuningtyas, D. T., Sormin,

D. H., Setiawan, E. P., Wulandari, E., & Hidayat, T. (2023). Social Forestry Development in East Kalimantan: Challenges and Opportunities. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, *1282*(1), 12016. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1282/1/012016

Rafiq, Y. S., & Sofilda, E. (2023). Analysis of the Impact of Social Forestry in Achieving Conflict Resolution and Sustainable Natural Rubber Management - Case Studies of Social Forestry in Jambi and East Kalimantan. *Enrichment Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *1*(6), 276–287. https://doi.org/10.55324/enrichment.v1i6.39

Ragandhi, A. (2021). Synergy Development of "State-Representative Apparatus" in Accelerating Social Forestry Policy Outcomes in Ngawi Regency, East Java. *Cakrawala*, *15*(2), 109–123. https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i2.374

Ragandhi, A., Hadna, A. H., Setiadi, S., & Maryudi, A. (2021). Why Do Greater Forest Tenure Rights Not Enthuse Local Communities? An Early Observation on the New Community Forestry Scheme in State Forests in Indonesia. *Forest and Society*, 159–166. https://doi.org/10.24259/fs.v5i1.11723

Rahayu, S., Laraswati, D., Pratama, A. A., Permadi, D. B., Sahide, M. A. K., & Maryudi, A. (2020). How NGO Fulfill the Complex Scheme of Social Forestry: A Resume of SF Scheme in Indonesia. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, *449*(1), 12051. https://doi.org/10.1088/1755-1315/449/1/012051

Rahayu, S., Sakuntaladewi, N., Sumirat, B. K., Widyaningsih, T. S., Yusnikusumah, T. R., Muin, N., & Bisjoe, A. R. H. (2024). The Role of Local Governments in Supporting Social Forestry Implementation in Indonesia: A Social Network Analysis and Evidence From Eastern Indonesia. *Forest and Society*, *8*(1), 154–178. https://doi.org/10.24259/fs.v8i1.28524

Ramadhan, R., Syah, D. F., & Waskhito, N. T. (2022). Effectiveness and Institutional Conditions in Social Forestry Program: Case Study of Forest Village Community Institution (LMDH) Sumber Makmur, Forest Management Unit (KPH) Malang. *Jurnal Sylva Lestari*, *10*(1), 141–154. https://doi.org/10.23960/jsl.v10i1.525

Sabiq, A., Sulaiman, A. I., & Sugito, T. (2020). Family Empowerment Program as Community Education in Supporting the Prevention of the Covid-19 Pandemic. *International Educational Research*, *3*(3), p22. https://doi.org/10.30560/ier.v3n3p22

Salaka, F., Alviya, I., Suryandari, E. Y., Nurfatriani, F., & Muttaqin, M. Z. (2020). The Effectiveness of Local Institutional Arrangement for Community Plantation Forest. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, *17*(1), 75–92. https://doi.org/10.20886/jakk.2020.17.1.75-92

Sandbrook, C., Nelson, F., Adams, W. M., & Agrawal, A. (2010). Carbon, Forests and the REDD Paradox. *Oryx*, *44*(3), 330–334. https://doi.org/10.1017/s0030605310000475

Santika, T., Wilson, K. A., Budiharta, S., Kusworo, A., Meijaard, E., Law, E. A., Friedman, R., Hutabarat,

J. A., Indrawan, T. P., John, F. A. V. St., & Struebig, M. J. (2019). Heterogeneous Impacts of Community Forestry on Forest Conservation and Poverty Alleviation: Evidence From Indonesia. *People and Nature*, *1*(2), 204–219. https://doi.org/10.1002/pan3.25

Setiajiati, F., Karyaatmadja, B., Sutedja, I. G. N. N., Kuswondho, H., Satria, P., Sejati, & Maharani, R. S. (2019). Lesson Learned From Social Forestry Practice in a Forest and Climate Change Project in Kalimantan, Indonesia. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, *363*(1), 12001. https://doi.org/10.1088/1755-1315/363/1/012001

Singgalen, Y. A., Sijabat, R., Widyastuti, P., & Harnadi, A. (2022). Community Empowerment and Social Welfare Development Through Social Entrepreneurship. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, *6*(2), 217–231. https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13302

Sirimorok, N., Fisher, M. R., Verheijen, B., & Sahide, M. A. K. (n.d.). Placing the commoning first: Getting beyond the patronage trap in natural resource decentralization policies. *Forest and Society*, *7*(2), 412–434.

Suharjito, D., & Wulandari, C. (2019). A Reflection of Social Forestry in 2019: Towards Inclusive and Collaborative Government Approaches. *Forest and Society*, *3*(1), 137. https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6099

T.T., P., Chau, N. H., Linh, D. T., Long, H. T., & Fisher, M. R. (2020). The Politics of Numbers and Additionality Governing the National Payment for Forest Environmental Services Scheme in Vietnam: A Case Study From Son La Province. *Forest and Society*, 379–404. https://doi.org/10.24259/fs.v4i2.10891

Tajuddin, T. (2020). The Importance of "Business Management" in Social Forestry Development in Production Forest. *Buletin Eboni*, *2*(1), 7–16. https://doi.org/10.20886/buleboni.5701

Toumbourou, T. D., Dunphy, M. B., Mulyani, L., Auwalin, I., Rumayya, R., Hartoto, A. S., Aji, G. B., Utomo, M. M. B., Amin, N., Yaman, Y., Fakhrani, F. A., Yasmin, P. A., Afriyani, A., Masri, M., Arisanti, D., Tjawikrama, D., Friedman, R., & Rawluk, A. (2025). Social Forestry for a Good Life? The Uneven Well-being Benefits of Indonesia's Social Forestry Scheme. *People and Nature*, *7*(6), 1443–1463. https://doi.org/10.1002/pan3.70042

Utomo, M. M. B., Widiyanto, A., Sudomo, A., Suhartono, S., Palmolina, M., & Pieter, L. A. G. (2023). Challenges to Achieving the Social Forestry Goal of Alleviating Poverty in Eastern Indonesia. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, *1266*(1), 12026. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1266/1/012026

Veen, H. v. '., Vyamana, V. G., & Santos, M. J. (2021). Forest Governance and Development Effects on Tropical Charcoal Production and Deforestation. *Environmental Research Letters*. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac462d

Wisniewski, M. (2001). Using SERVQUAL to Assess Customer Satisfaction With Public Sector Services.

Managing Service Quality, *11*(6), 380–388. https://doi.org/10.1108/eum0000000006279

Zulu, L. C. (2013). Bringing People Back Into Protected Forests in Developing Countries: Insights From Co-Management in Malawi. *Sustainability*, *5*(5), 1917–1943. https://doi.org/10.3390/su5051917